





## 1. PENDAHULUAN

Keberadaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah mengharapakan bagi wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan akan semaksimal mungkin untuk menekan pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku, yaitu manajemen pajak dengan melaksanakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan cara penghindaran pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah. Praktik penghindaran pajak membuat Indonesia kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah besar.

Fenomena kasus *tax avoidance* pada wajib pajak badan diduga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Dugaan tersebut dilaporkan oleh lembaga *Global Witness*, mengungkapkan bahwa perusahaan PT Adaro Energy Tbk dalam periode 2009 sampai 2017. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mendalami dugaan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Coaltrade Service International anak perusahaannya di Singapura telah mengatur sedemikian rupa, diketahui dengan menjual batu bara ke Coaltrade Service dengan harga jual yang lebih murah kemudian batu bara tersebut di jual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga pendapatan kena pajak di Indonesia menjadi lebih murah. Dengan cara tersebut Adaro berhasil meminimalkan pembayaran pajak hingga 125 juta dollar atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (Sugianto, 2019).

Tuntutan perusahaan dalam melaksanakan *tax avoidance* harus dibawah pengawasan yang tepat menjadikan terbentuknya mekanisme *good corporate governance*. Keberadaan mekanisme *good corporate governance* merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis (Tandean, 2017). *Good corporate governance* terdiri dari mekanisme internal yaitu dewan komisaris independen, komite audit serta mekanisme eksternal yaitu kepemilikan institusional. Kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance* dapat dipengaruhi juga dari ukuran suatu perusahaan. Jika semakin besar ukuran perusahaan, maka laba akan meningkat yang menyebabkan pembayaran pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan permasalahan yang dibahas adalah “Apakah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energy dan *basic materials*?”

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis memiliki tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.



## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi (*agency theory*) adalah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) dengan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan yang kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut Jensen & Meckling (1976). Menurut Tandean (2017) teori keagenan mengimplikasikan tentang adanya asimetri informasi yaitu kondisi dimana salah satu pihak dalam kegiatan ekonomi mengetahui lebih banyak informasi diantara *agent* dan prinsipal.

Adanya konflik kepentingan akan menimbulkan ketidakpastian informasi yang akan menimbulkan masalah keagenan yaitu perbedaan kepentingan antara manajer selaku *agent*. Masalah keagenan yang timbul dalam perusahaan dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena adanya perbedaan kepentingan dan tujuan kedua belah pihak. Dalam tujuan untuk menjembatani masalah keagenan timbul praktik *tax avoidance* sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat berjalan secara optimal.

### Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007) Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Tax avoidance

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* menurut N.A.Barr, S.R. James, A.R. Prest dalam Zain (2008:50) diartikan memanipulasi penghasilan yang pelaksanaannya legal, serta masih sesuai ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku dengan tujuan meminimalisasi pembayaran pajak yang terutang. Dewan komisaris independen

### Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Dewan Komisaris Independen adalah anggota dari dewan komisaris yang asalnya berasal dari luar emiten atau perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi komisaris independen sebagaimana yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2014) no. 33/POJK.04/2014 yaitu, bukan merupakan individu yang bekerja atau memiliki tanggung jawab dalam memimpin, merencanakan, mengendalikan serta memantau kegiatan perusahaan, tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bersangkutan, tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kepentingan usaha dengan perusahaan dan jajaran anggota perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Komisaris independen memiliki komitmen dengan pemegang saham untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan pemegang saham. Hal tersebut membuat komisaris independen memperjuangkan ketaatan pajak, sehingga semakin tinggi jumlah komisaris independen dalam perusahaan dapat membantu mengurangi praktik *tax avoidance* karena semakin tinggi jumlah komisaris independen semakin tinggi juga pengawasan aktivitas emiten atau perusahaan yang berkaitan langsung dengan perilaku oportunistik.

### H<sub>1</sub> : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

### Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Menurut Siregar et al. (2005) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan seperti bank, dana pension, asuransi, dan *investment banking*. Damayanti & Susanto, (2016) keterikatan tanggung jawab perusahaan dengan pemegang saham, membuat pemilik institusional mempunyai hak untuk memastikan manajemen perusahaan membuat keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Adanya tekanan untuk memenuhi harapan pihak institusional dalam memaksimalkan laba, berdampak bagi pihak manajemen untuk melakukan tindakan *tax avoidance* untuk meningkatkan laba perusahaan. Sehingga kepemilikan institusional yang tinggi secara umum berdampak lebih agresif dalam meminimalkan beban pajak sehingga semakin tinggi pelaksanaan *tax avoidance*.

### H<sub>2</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*



### Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Semakin banyak jumlah anggota komite audit akan memberikan dampak terhadap pengendalian dalam kebijakan laporan keuangan yang akan semakin ketat dan sulit untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Oleh sebab itu, semakin tinggi jumlah komite audit suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.

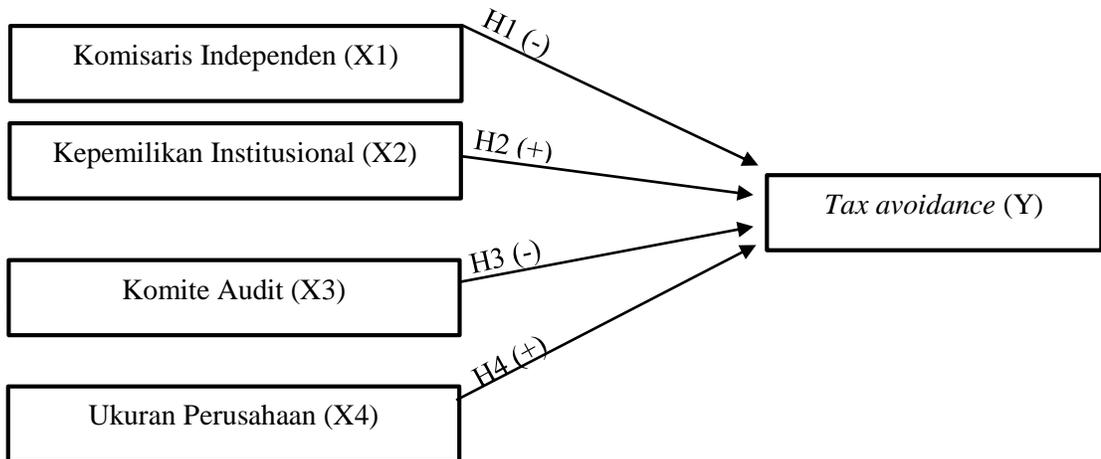
### H<sub>3</sub>: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

### Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan penelitian Suwito & Herawaty (2005) ukuran perusahaan merupakan skala dimana dapat dikategorikan besar kecil perusahaan, yang dapat dilihat dari total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain, sehingga ukuran perusahaan merupakan nilai yang menentukan besar kecilnya perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar lebih berpotensi memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pengelolaan pajak perusahaan. Dengan keunggulan sumber daya manusia ahli yang dimiliki oleh perusahaan ukuran besar akan memiliki dampak terhadap upaya meningkatkan tindakan *tax avoidance* dalam mengelola beban pajak.

### H<sub>4</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Gambar 1 Kerangka Pemikiran





### 3. METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam sektor *energy* dan *basic materials* terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti melakukan pengamatan terhadap data sekunder berupa *annual report* dan *financial report* perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* untuk periode 2018 - 2021. Pemilihan sampel penelitian ditentukan dengan teknik nonprobability sampling yaitu dengan metode purposive judgement sampling. Terdapat 10 perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel.

#### Variabel Penelitian

##### Tax Avoidance

Variabel dependen atau variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini yakni penghindaran pajak.

Rumus yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{total beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

##### Dewan Komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris independen dapat diukur dari jumlah anggota komisaris independent dibagi dengan jumlah anggota dewan komisaris, sebagai berikut :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}}$$

##### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dapat diukur dengan jumlah presentase saham yang dimiliki oleh pihak-pihak institusional dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan, sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

##### Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 dan jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya harus terdiri dari 3 anggota termasuk ketua komite audit. Komite audit dapat diukur menggunakan jumlah anggota komite audit di perusahaan, sebagai berikut :

$$\text{Komite Audit} = \text{jumlah anggota komite audit}$$

##### Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan hasil logaritma natural dari total asset (*natural logarithm total asset*). Pengukuran tersebut dengan pertimbangan total aset perusahaan lebih stabil jika dibandingkan dengan jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi pasar , sebagai berikut

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (total asset)}$$

##### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi teknik observasi. Teknik observasi adalah suatu teknik yang melibatkan kegiatan melihat, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku, tindakan atau peristiwa secara terencana (Uma & Roger, 2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan dan laporan



keuangan sektor basic materials dan energy tahun 2018 – 2021. Data yang diperoleh dengan mengunduh melalui situs [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com) dan situs tersendiri dari perusahaan kemudian diolah untuk mendapatkan hasil penelitian.

### Teknik Analisis Data

#### 1. Uji Kesamaan Koefisien / Pooling

Uji kesamaan koefisien ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggabungan data (pooling) antara data time series dan cross sectional dapat dilakukan.

#### 2. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018:19).

#### 3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

#### 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen yang berjumlah lebih dari satu (Ghozali, 2018:8). Adapun model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = *Tax avoidance*

$\alpha_0$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Dewan Komisaris Independen

$X_2$  = Kepemilikan Institusional

$X_3$  = Komite Audit

$X_4$  = Ukuran Perusahaan

$\varepsilon$  = Error



#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Penelitian

##### a. Uji Pooling

Tabel 1 Hasil Uji Pooling

| Uji Pooling Data | Kriteria    | Hasil | Keterangan         |
|------------------|-------------|-------|--------------------|
| DKI              | Sig. > 0,05 | 0,642 | Data dapat di-pool |
| KI               |             | 0,924 | Data dapat di-pool |
| KA               |             | 0,393 | Data dapat di-pool |
| SIZE             |             | 0,847 | Data dapat di-pool |
| D1               |             | 0,185 | Data dapat di-pool |
| D2               |             | 0,774 | Data dapat di-pool |
| D3               |             | 0,397 | Data dapat di-pool |
| D1XDKI           |             | 0,321 | Data dapat di-pool |
| D1XKI            |             | 0,173 | Data dapat di-pool |
| D1XKA            |             | 0,324 | Data dapat di-pool |
| D1XSIZE          |             | 0,230 | Data dapat di-pool |
| D2XDKI           |             | 0,907 | Data dapat di-pool |
| D2XKI            |             | 0,746 | Data dapat di-pool |
| D2XKA            |             | 0,748 | Data dapat di-pool |
| D2XSIZE          |             | 0,780 | Data dapat di-pool |
| D3XDKI           |             | 0,693 | Data dapat di-pool |
| D3XKI            |             | 0,727 | Data dapat di-pool |
| D3XKA            |             | 0,940 | Data dapat di-pool |
| D3XSIZE          |             | 0,360 | Data dapat di-pool |

Sumber : Data olahan SPSS

Hasil uji pooling menunjukkan bahwa DKI, KI, KA, SIZE, D1, D2, D3, D1XDKI, D1XKI, D1XKA, D1XSIZE, D2XDKI, D2XKI, D2XKA, D2XSIZE, D3XDKI, D3XKI, D3XKA, D3XSIZE lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data penelitian dapat dilakukan.

##### b. Analisis Deskriptif

Tabel 2 Hasil Analisis Deskriptif

|      | N  | Minimum  | Maximum  | Mean       | Std. Deviasi |
|------|----|----------|----------|------------|--------------|
| ETR  | 40 | 0,24842  | 0,02031  | 0,1664742  | 0,06622432   |
| DKI  | 40 | 0,33333  | 0,50000  | 0,3852381  | 0,06081792   |
| KI   | 40 | 0,44849  | 0,97730  | 0,7108285  | 0,14711682   |
| KA   | 40 | 3        | 4        | 3,10       | 0,304        |
| SIZE | 40 | 27,54117 | 31,44026 | 29,5369779 | 1,29665967   |

Sumber : Data olahan SPSS

(1) Didasari oleh tarif pajak badan Indonesia tahun 2018 sampai 2019 sebesar 25% dan tahun 2020 sampai 2021 adalah 22%. *Tax avoidance* di uji menunjukkan hasil nilai minimum sebesar 24,84% yang dimiliki oleh PT Bayan Resources Tbk di tahun 2019 nilai tersebut mengindikasikan semakin kecil tindakan *tax avoidance* pada perusahaan. Nilai maximum menunjukkan hasil sebesar 2,03% dimiliki oleh PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sehingga nilai tersebut mengindikasikan terjadinya *tax avoidance*. Sedangkan nilai rata – rata (*mean*) *tax avoidance* menunjukkan hasil -17,75% dengan standar deviasi 0,06622432

(2) Variabel dewan komisaris independen (DKI) memiliki nilai minimum yang artinya jumlah komisaris independen sebesar 33,3% dari total dewan komisaris. Nilai ini salah satunya dimiliki oleh PT AKR Corporindo Tbk pada tahun 2019. Sedangkan nilai maksimum sebesar 50% yang artinya jumlah komisaris independen sebesar 50% dari total dewan komisaris.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dimana salah satunya dimiliki oleh PT Sillo Maritime Perdana Tbk pada tahun 2019. Sedangkan nilai *mean* atau rata – rata menunjukkan hasil sebesar 38,52% dengan standar deviasi 0.06081792

(3) Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai minimum sebesar 44,85%, artinya 44,85% saham PT Sillo Maritime Perdana Tbk dimiliki institusi. Sedangkan nilai maksimum sebesar 97,73% pada PT Cita Mineral Investindo Tbk pada tahun 2020 dimiliki oleh institusi. Kemudian nilai rata – rata (*mean*) kepemilikan institusional menunjukkan hasil sebesar 71,08% dengan standar deviasi 0.14711682

(4) Variabel komite audit (KA) memiliki nilai minimum sebesar 3 hasil tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yang mengharuskan perusahaan untuk memiliki minimal 3 anggota komite audit, dan nilai maksimum sebesar 4. Kemudian nilai rata – rata (*mean*) komite audit adalah 3.10 dan standar deviasi sebesar 0.304

(5) Variabel ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai logaritme natural minimum sebesar 27,54%, logaritma natural tersebut dimiliki oleh PT Emdeki Utama Tbk tahun 2018 dengan total aset sebesar Rp 914.065.000.000 dan nilai maksimum Ln sebesar 31,44% total aset sebesar Rp 45.116.209.346.000 yang dimiliki oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tahun 2021. Kemudian nilai rata- rata (*mean*) sebesar 29.5369 dengan standar deviasi sebesar 1,29665967.

**c. Uji Asumsi Klasik**

**Tabel 3 Hasil Uji Asumsi Klasik**

| Nama Pengujian         | Kriteria                      | Hasil    |           |       | Keterangan                      |
|------------------------|-------------------------------|----------|-----------|-------|---------------------------------|
|                        |                               | Variabel | Tolerance | VIF   |                                 |
| Uji Normalitas         | Asymp. Sig. (2tailed) > 0.05  | 0.025    |           |       | Data tidak berdistribusi normal |
| Uji Multikolinieritas  | Tolerance v. > 0.10, VIF < 10 | DKI      | 0,952     | 1,051 | Lolos uji multikolinieritas     |
|                        |                               | KI       | 0,685     | 1,459 |                                 |
|                        |                               | KA       | 0,837     | 1,195 |                                 |
|                        |                               | SIZE     | 0,645     | 1,550 |                                 |
|                        |                               |          |           |       |                                 |
| Uji Heterokedastisitas | Sig. > 0.05                   | Variabel | Sig       |       | Lolos uji heterokedastisitas    |
|                        |                               | DKI      | 0,649     |       |                                 |
|                        |                               | KI       | 0,193     |       |                                 |
|                        |                               | KA       | 0,058     |       |                                 |
|                        |                               | SIZE     | 0,222     |       |                                 |
| Uji Autokorelasi       | Asymp. Sig (2tailed) > 0.05   | 0,873    |           |       | Lolos uji autokorelasi          |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

| Uji Analisis Regresi | Koefisien |
|----------------------|-----------|
| Constant             | -0,609    |
| DKI                  | 0,160     |
| KI                   | 0,100     |
| KA                   | -0,099    |
| SIZE                 | 0,021     |

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, maka diperoleh model/persamaan regresi sebagai berikut:

$$TA = -0,609 + 0,160DKI + 0,100KI - 0,099KA + 0,021SIZE$$

e. Pengujian Hipotesis

Tabel 5 Hasil Pengujian Hipotesis

| Nama Pengujian        | Variabel                       | Kriteria    | B      | Sig.  | Keterangan  |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|--------|-------|-------------|
| Uji F                 | DKI, KI, KA, SIZE              | Sig. < 0,05 |        | 0,042 | Ha diterima |
| Uji t                 | DKI                            | Sig. < 0,05 | 0,160  | 0,168 | Ha ditolak  |
|                       | KI                             |             | 0,100  | 0,111 | Ha ditolak  |
|                       | KA                             |             | -0,099 | 0,004 | Ha diterima |
|                       | SIZE                           |             | 0,021  | 0,016 | Ha diterima |
| Koefisien Determinasi | Nilai $R^2 = 0,241$ atau 24,1% |             |        |       |             |

(1) Uji Statistik F

Dasar pengujian statistik F untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pada tabel 4.8 yang menunjukkan hasil uji signifikansi simultan F yaitu sig. 0,042 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan secara simultan atau bersama – sama memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

(2) Uji statistik t

Dasar pengujian statistik t untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variasi variabel dependen. Berikut penjabaran dari hasil uji signifikansi parameter individual atau t pada tabel 4.8 pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen :

- Koefisien untuk variabel dewan komisaris independent sebesar 0,160 dengan nilai hasil sig. sebesar 0,168 artinya  $> \alpha = 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha1 ditolak dengan arti dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- Koefisien untuk variabel kepemilikan institusional sebesar 0,100 dengan hasil sig menunjukkan sebesar 0,111 artinya  $< \alpha = 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha2 ditolak dengan arti kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.
- Koefisien untuk variabel komite audit sebesar -0,099 dengan nilai sig. sebesar 0,004 artinya  $< \alpha = 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha3 diterima , yaitu komite audit cukup bukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
- Koefisien untuk variabel ukuran perusahaan sebesar 0,021 dan nilai sig. sebesar 0,016 artinya  $< \alpha = 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha4 diterima dengan arti ukuran perusahaan cukup bukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

(3) Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji  $R^2$  membuktikan bahwa 24,1% variasi *tax avoidance* dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya 75,9% dijelaskan oleh variasi lain di luar model.



## Pembahasan

### a. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Dalam hipotesis peneliti menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Didasarkan hasil pengujian statistik t, diperoleh hasil koefisien regresi sebesar 0,160 dengan hasil sig. sebesar 0,336 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Melalui hasil pengujian yang dilakukan, menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis yang diajukan peneliti (H1) ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance* tidak dapat ditentukan oleh variabel dewan komisaris independen. Menurut Wahyudi (2014) mungkin yang dapat memberikan pengaruh pada perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* jika komisaris independen memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang keuangan dan perpajakan, dan bukan hanya sekedar eksistensi dan jumlah anggota dari komisaris independen. Apabila komisaris independen dalam perusahaan memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan perpajakan, perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*. Sebagai contoh, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia memiliki komisaris independen sebanyak 3 anggota tetapi menunjukkan hasil tarif ETR sebesar -3,04% pada tahun 2020 nilai tersebut mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance*, sedangkan PT Samindo Resources Tbk pada tahun 2018 hanya memiliki 1 dewan komisaris dengan hasil ETR sebesar 24,78% nilai tersebut mengindikasikan tindakan perusahaan melakukan *tax avoidance* sangat kecil.

### b. Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Dalam hipotesis peneliti menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Didasarkan hasil pengujian statistik t, diperoleh hasil koefisien regresi 0,100 dan hasil sig. sebesar 0,222 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Melalui hasil pengujian, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis yang diajukan (H2) ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance* tidak dapat ditentukan oleh variabel kepemilikan institusional. Menurut Tandssean (2017) penyebab dugaan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena pemilik institusional tidak berperan secara langsung dalam memantau tindakan oportunitis atau penyebab lainnya karena pemilik institusional memiliki sifat egois sehingga lebih mementingkan untuk memaksimalkan kesejahteraannya dalam peningkatan laba yang akan diterima pemilik institusional. Sebagai contoh, kepemilikan PT Cita Mineral Investindo Tbk dimiliki oleh pihak institusi sebesar 97,3% dengan ETR -22,5% pada tahun 2019 indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* sangat kecil. Sedangkan kepemilikan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk pada tahun 2018 hanya sebesar 59,67% dengan ETR -2% indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* sangat besar.

### c. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*

Dalam hipotesis peneliti menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Didasarkan hasil pengujian statistik t, diperoleh hasil koefisien regresi sebesar -0,099 dan sig. menunjukkan hasil 0,008 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Melalui hasil pengujian, menunjukkan bahwa komite audit cukup bukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Bukti pengujian menunjukkan bahwa hipotesis (H3) diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh variabel komite audit. Dapat dikatakan peran dan tanggung jawab komite audit dalam membantu aktivitas monitoring pelaporan eksternal perusahaan. Komite audit pun memberikan peran untuk melakukan analisa terhadap ketaatan emiten terhadap peraturan undang-undang yang berlaku.

### d. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*

Dalam hipotesis peneliti menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Didasarkan hasil pengujian statistik t, diperoleh hasil koefisien regresi sebesar 0,021 dengan nilai sig. 0,032 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Melalui hasil pengujian, menunjukkan bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



komite audit cukup bukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Bukti pengujian menunjukkan bahwa hipotesis (H2) diterima.

Hasil pengujian membuktikan bahwa tingkat perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Jika semakin besar ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap peningkatan laba yang besar sehingga akan berdampak terhadap pembayaran pajak yang semakin meningkat dan semakin besar ukuran suatu perusahaan akan berpotensi perusahaan memiliki sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perpajakan, sehingga akan memudahkan perusahaan dalam menekan pembayaran pajak dan meningkatkan tindakan *tax avoidance* dalam mengelola beban pajak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak cukup bukti untuk berpengaruh terhadap *tax avoidance* kemudian komite audit cukup bukti berpengaruh negatif dan ukuran perusahaan cukup bukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti proksi *tax avoidance* lainnya misalnya menggunakan cash ETR dan current ETR, menggunakan mekanisme good corporate governance lainnya, dan meneliti menggunakan sampel dari perusahaan sektor lain. Bagi investor Investor sebaiknya memberikan perhatian terhadap praktik *tax avoidance* dalam pemilihan investasi agar dapat melihat lebih bijaksana dalam menilai resiko atas investasi tersebut. Bagi Direktorat Jendral Pajak dalam memprediksi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* dapat dilihat melalui jumlah komite audit yang rendah dan ukuran perusahaan yang besar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5253>
- Arifanta, Y. N. (2018). *Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax avoidance Yusvita*. 6(2), 69–86.
- Bowerman, B. L., O'connell, R. T., & Murphree, E. S. (2017). Business Statistics in Practice. In *MSOR Connections* (Vol. 3, Nomor 2). <https://doi.org/10.11120/msor.2003.03020046>
- Committee, C. (1992). The Financial Aspect of Corporate Governance. *The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd.*, 19(No 76), pp 343-52.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). business research methods. In *Proceedings of the Annual Reliability and Maintainability Symposium*. <https://doi.org/10.1109/arms.1991.154456>
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap *Tax avoidance*. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Linked references are available on JSTOR for this article : Agency Theory : An Assessment and Review. *Academy of Management*, 14(1), 57–74.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Governance, K. N. K. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hidayat, M. S. (Sekolah T. I. E. I. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 143–151. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.16>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1989). Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kementerian BUMN. (2012). Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 4, Nomor 2, hal. 193–201).
- Koming, N., & Praditasari, A. (2017). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana pengaruh good corporate governance , ukuran perusahaan , leverage dan profitabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ) , Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud )*. 19, 1229–1258.
- Manosson, H. (2016). *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). pengaruh corporate governance terhadap *tax avoidance* (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance* (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.



- Oliviana, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.36423/jumper.v4i1.961>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik*. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK%2033%20Direksi%20dan%20Dewan%20Komisaris%20Emiten%20Atau%20Perusahaan%20Publik.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Ojk.Go.Id*, 1–29. [http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK%20PERIZINAN%20FINAL%20F.pdf)
- Pamudji, S., & Trihartati, A. (2010). pengaruh independensi dan efektivitas komite audit terhadap manajemen laba. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(1), 21–29. <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda>
- Peraturan Pemerintah RI. (2007). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. In *Pravoslavie.ru* (Vol. 2000).
- Peraturan Pemerintah RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008* (Nomor 1).
- Pradihasari, N. K., & Setiawan, P. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Instusional Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Sandra, A., & Edeline, E. (2018). terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2015 Syafrina Agny Islami. *Jurnal Bina Akuntansi*, 5(021), 1–16.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap *tax avoidance*: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). *a survey of corporate governance*. 52(2), 737–783.
- Siregar, N.P, S. V., & Utama, S. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Sna VIII, September*, 475–490.
- Sochib. (2016). Good Corporate Governance Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Etika Bisnis dan Profesi*, 2(2), 104.
- Sulisiyanto, S. (2008). *Manajemen Laba* (Vol. 4, Nomor 1). PT. Grasindo.
- Suwito, E., & Herawaty, A. (2005). *SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005. September*, 15–16.
- Tandean, V. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*. 978–979. [https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33073%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33073/13312501 Yapto Rizaldi.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33073%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33073/13312501%20Yapto%20Rizaldi.pdf?sequence=1)
- Uma, S., & Roger, B. (2013). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. *Leadership & Organization Development Journal*, 34(7), 700–701. <https://doi.org/10.1108/loj-06-2013-0079>
- Wahyudi, D. (2014). pengaruh good corporate governance dan pemeriksaan pajak terhadap *tax avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

